

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan studi tentang penerapan mitigasi nonstruktural berbasis kearifan lokal masyarakat pesisir pantai Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pemerintah telah memberikan *support* dengan membuat kebijakan atau aturan sebagai pedoman dalam melakukan penanggulangan bencana, hanya saja kebijakan atau aturan terkait mitigasi hanya dikaji secara umum. Kemudian untuk pedoman mitigasi dengan memanfaatkan aspek budaya sama sekali belum ada aturan jelas terkait metode tersebut.

Kemudian untuk mempermudah pelaksanaan mitigasi berbasis kearifan lokal pemerintah telah membentuk lembaga yang berasal dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan mitigasi serta bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam proses mitigasi. Hanya saja pada pelaksanaannya pemerintah masih kurang memanfaatkan kerjasama dengan organisasi luar seperti KAN dan WALHI. Padahal untuk melaksanakan mitigasi berbasis kearifan lokal masyarakat akan lebih optimal apabila melakukan kerjasama dengan kedua lembaga tersebut.

Selanjutnya pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa secara umum masyarakat dikawasan pesisir pantai telah memahami bagaimana langkah-langkah mitigasi yang sebenarnya. Namun pada pelaksanaannya masyarakat yang berada dikawasan pesisir pantai cenderung lebih *aware* dibandingkan dengan masyarakat

yang bertempat tinggal dikawasan perbukitan. Hal ini terlihat ketika masyarakat yang berada dikawasan pesisir pantai telah menjalankan instruksi pemerintah, salah satunya dengan menyiapkan Tas Siaga Bencana. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat yang merasa mereka berada pada wilayah aman karena jauh dari kawasan bibir pantai.

Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan pelatihan dan pendidikan terkait mitigasi bencana kepada masyarakat pada wilayah tersebut, namun pada kenyataannya pendidikan dan pelatihan tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak optimal. Dimana untuk Kelurahan Pantai Air Manis hingga tahun 2019 pelatihan dan pendidikan terkait mitigasi dilakukan dengan cara mengunjungi warga dari rumah-kerumah. Hal ini juga terjadi pada 5 kelurahan yang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dari 6 kelurahan. Terdapat hanya 1 kelurahan yaitu Kelurahan Teluk Kabung Tengah yang melaksanakan kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pihak kelurahan dengan melibatkan *stakeholder* dikelurahan tersebut.

Hal ini terjadi karena terbatasnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Forum Kelompok Siaga Bencana baik itu tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan. Padahal hal ini dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan tradisi tolak bala sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat terkait mitigasi bencana, mengingat tradisi tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun pada kedua wilayah tersebut dan banyak dihadiri oleh masyarakat diwilayah tersebut. Selain itu pemerintah dan FKSB juga dapat memanfaatkan kehadiran KAN dan budaya

“kembali kesurau” untuk menerapkan metode mitigasi dengan memanfaatkan kearifan lokal sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan mitigasi.

6.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian Mitigasi Bencana Gempa Bumi Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai Kota Padang adalh sebagai berikut:

1. Mengkaji ulang terkait dokumen kebijakan mengenai mitigasi bencana karena selama ini kebijakan tersebut belum dibuat secara rinci dan jelas.
2. Membentuk kerjasama dengan kelompok adat seperti KAN dan organisasi peduli lingkungan seperti WALHI
3. Menggali metode kearifan lokal yang ada pada masyarakat sebagai bentuk wadah pendidikan dan pelatihan masyarakat menggunakan metode kearifan lokal.
4. Memanfaatkan tradisi tolak bala, kelompok majelis ta'lim dan MDA/TPA sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kegiatan mitigasi bencana dikalangan masyarakat.
5. Memperbaiki sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengedukasi masyarakat terkait penanggulangan bencana. Seperti *banner* dan petunjuk jalur evakuasi.

6. Memberikan dukungan dan perhatian kepada Forum Kelompok Siaga Bencana tingkat kecamatan dan kelurahan, misalnya dengan mengukuhkan forum tersebut secara legal baik itu tingkat kecamatan maupun kelurahan.



UNIVERSITAS ANDALAS

